B A B II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1. Sejarah Singkat PT. Jasa Marga (Persero)

PT. Jasa Marga (Persero) secara resmi berdiri pada tanggal 1 Maret 1978 sesuai akte notaris Kartini Mulyadi S.H. dengan Akte No. 1 tanggal 1 Maret 1978 dan diubah dengan akte No. 187 tanggal 19 Mei 1981 yang dibuat di hadapan notaris yang sama dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A. 5/130/1 tanggal 22 Februari 1982 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di bawah No. 1138 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 September 1982 No. 73. Selanjutnya diubah dan ditambah dengan akte No. 7 tanggal 4 Oktober 1985 dihadapan Winnie Hadiprojo S.H. pengganti Kartini Mulyadi S.H. di Jakarta dan akte No. 112 tanggal 29 Oktober 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi S.H. telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7339.HT.01.04 Tahun 1985 tanggal 15 November 1985. Serta diumumkan dalam tambahan No. 53 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1986 No. 4. Tugas pokok yang dibebankan pemerintah kepada perseroan adalah meliputi pengadaan, pengelolaan serta pemeliharaan jalan tol dan jembatan tol.

PT. Jasa Marga (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Jasa Marga (Persero) adalah suatu perseroan terbatas milik negara yang didirikan dalam rangka melaksakan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah tentang pendirian perusahaan perseroan (Persero) di bidang pengadaan, pengelolaan dan

pemeliharaan jalan/jembatan tol serta ketentuan-ketentuan penguasaannya. Dalam bidang usahanya PT. Jasa Marga (Persero) merupakan suatu perseroan yang berada di bawah pembinaan teknis Departemen Pekerjaan Umum.

Saat ini PT. Jasa Marga (Persero) telah mengelola beberapa jalan dan jembatan tol. Jalan tol pertama yang dibangun adalah jalan Tol Jagorawi seksi Jakarta, Cibinong pada bulan April 1978. Sejak mulai beroperasinya tahun 1978 PT. Jasa Marga (Persero) telah mencapai peningkatan laba bersih dari tahun ke tahun. Laba setelah pajak penghasilan setelah tahun 1987 tercatat sebesar Rp. 2.580.131.000,00.

Berdasarkan akte pendirian perseroan serta perubahannya yang dibuat oleh notaris Kartini Mulyadi S.H. tanggal 4 Oktober 1985, maka modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 350.000.000.000,00 terbagi atas 35.000 saham yang terdiri atas 7.000 saham prioritas dan 28.000 saham biasa, masing-masing saham sebesar Rp. 10.000.000,00.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S.668/KM.001/1981 dan No.1182/KM.001/1982, maka pemenuhan tambahan penyertaan modal pemerintah seharusnya dilakukan pemerintah dari biaya pembangunan jalan dan jembatan tol yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan dana pemerintah.

Pelaksanaan bunyi surat keputusan menteri keuangan tersebut di atas telah mulai direalisasikan berupa pelimpahan jalan Tol Jagorawi dan Jembatan Citarum yang bernilai Rp. 32.739.208.000,00 kepada PT. Jasa Marga (Persero). Pelimpahan tersebut dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.571/MK.001/1985 tanggal 4 Juli 1985 dengan perincian

Rp. 32.500.000.000,00. sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia dan Rp. 229.208.000,00. sebagai cadangan umum.

Berdasarkan hal di atas, modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk saham prioritas berjumlah 5320 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 53.200.000.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan (Persero), PT. Jasa Marga (Persero) telah ditetapkan dana dan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pembangunan ruas jalan tol Jakarta-Tangerang, jalan pintas Ciujung dan jalan pintas Serang menjadi penambah modal saham pemerintah. Besarnya biaya penambahan modal akan ditetapkan oleh menteri keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Keuangan. Sambil menunggu perhitungan akhir di atas, PT. Jasa Marga (Persero) membukukan tambahan penyertaan modal pemerintah tersebut sebesar Rp. 45.136.353.000,00. sebagai modal disetor lainnya umum sesuai dengan catatan perusahaan tentang besarnya jumlah dan pembiayaan dalam rangka pembangunan jalan tol Jakarta-Merak.

Sedangkan pembangunan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Padaleunyi-Citarum yaitu pada tanggal 11 Maret 1991, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto. Gerbang tol cabang Padaleunyi-Citarum dibagi menjadi delapan gerbang, yaitu: 1. Pasteur

2. Padalarang

3. Baros

4. Pasirkoja

5. Kopo

6. Moh. Toha

7. Buah Batu

8. Cileunyi

Pada tahun 1994 diadakan penggabungan gerbang tol pada cabang Padaleunyi, yaitu gerbang Tol Citarum yang berdiri sendiri, karena adanya likuidasi dari pemerintah. Surat keterangan yang dikeluarkan yaitu SK PT. Jasa Marga NO/067/KPTS/1994, mengenai penggabungan gerbang tol dengan cabang gerbang tol yang terdekat. Maka gerbang tol Padaleunyi-Citarum menjadi sembilan gerbang tol ditambah dengan gerbang tol Citarum.

PERPUSTAKAAN

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar dalam manajemen sebuah perusahaan, karena dengan mempelajari struktur organisasi suatu perusahaan akan dengan mudah pula mempelajari kehidupan perusahaan, baik jenjang otoritas, wewenang, hubungan antara karyawan, maupun tanggung jawab masing-masing.

Struktur organisasi ini menggambarkan hubungan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi juga akan memudahkan pimpinan perusahaan dalam mengatur dan mengkondisikan unit kerja atau bagian-bagian yang terlibat di suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi diperlukan bagi perusahaan agar tercipta situasi kerja yang teratur dan lancar tanpa terjadi tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab.

(Struktur organisasi PT. Jasa Marga (Persero) terdapat pada lampiran 6 laporan ini)

2.3. Deskripsi Jabatan

Adapun deskripsi jabatan pada PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Padaleunyi-Citarum sesuai dengan keputusan Direksi PT. Jasa Marga Nomor: 133/KPTS/2001 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Cabang

   Fungsi pokok :

   Menyelenggarakan kegiatan operasi cabang yang meliputi: pengelolaan SDM beserta sarana pendukungnya, operasional pengumpul tol, perencanaan, pembangunan, pelayanan dan pemeliharaan jalan tol.

2. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

   Fungsi pokok :

   Melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM, ketatausahaan, pengadaan barang/jasa, pengembangan usaha dan pembinaan usaha kecil dan koperasi di lingkungan cabang.

3. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia.

   Fungsi pokok :

Melakukan kegiatan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta hubungan masyarakat di cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kepala Sub Bagian Umum.

   Fungsi pokok :

   Melakukan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kepala Sub Bagian Logistik.

   Fungsi pokok :

   Melakukan kegiatan berupa pengadaan barang/jasa dan administrasi barang, tanah dan bangunan cabang.

6. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha dan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

   Fungsi pokok :

   Melakukan kegiatan pengembangan usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol di cabang serta pembinaan usaha kecil dan koperasi yang berlokasi di sekitar cabang.

7. Kepala Bagian Keuangan.

   Fungsi pokok :

   Melaksanakan kegiatan dalam bidang keuangan dan akuntansi serta perpajakan untuk mendukung kelancaran operasional cabang sesuai dengan tata laksana, peraturan dan tingkat kewenangan yang telah ditetapkan.

8. Kepala Sub Bagian Anggaran.

   Fungsi pokok :

Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengendalian rencana kerja dan anggaran tahunan cabang serta pengelolaan dana operasi/kerja cabang sesuai dengan pedoman/tata laksana dan tingkat kewenangan yang telah ditetapkan.

9. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Perpajakan.

   Fungsi pokok :

   Melaksanakan kegiatan pembukuan transaksi keuangan dan perhitungan pajak sesuai dengan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan serta menyusun laporan keuangan cabang.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan perusahaan seluruhnya tercantum pada visi dan misi perusahaan, antara lain:

Visi Perusahaan

Visi PT. Jasa Marga (Persero) adalah sebagai penyelenggara jalan tol yang profesional, unggul dan terpercaya dalam kerangka pembangunan nasional, yang maknanya sebagai berikut :

1. Sebagai badan usaha yang sesuai dengan Undang-Undang, mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan usaha jalan tol, PT. Jasa Marga harus dapat memberikan hasil yang terbaik dalam melaksanakan tugas, merencanakan, membangun, memelihara, mengoperasikan jalan tol di Indonesia.
2. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT. Jasa Marga harus dapat tumbuh dan berkembang secara sehat agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi pemilik saham dan masyarakat pada umumnya dan pengguna jalan tol pada khususnya.

Misi Perusahaan

Misi PT. Jasa Marga (Persero) dalam rangka proses bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pemakai jalan.
2. Mengembangkan pembangunan dan operasi jalan tol yang layak dan mendukung pembangunan nasional.
3. Mengelola perusahaan secara profesional agar sehat, tumbuh dan berkembang.
4. Melakukan pembinaan organisasi dan karyawan secara sistematis dan terarah.
5. Menjalankan usaha dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.